

SKRIPSI

**“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA
PEMERINTAHAN DESA LEBUH LURUS KECAMATAN INUMAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

*Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi S1 Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi*

Universitas Islam Riau



OLEH:

SULISTIA NENGSIH

155310901

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S-1

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SULISTIA NENGSIH
NPM : 155310901
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI-S1
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan
Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan
Singingi

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Dr.H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak.,CA

Mengetahui :

DEKAN

KETUA PRODI AKUNTANSI S1

Drs. H. Abrar, M.Si.,AK.,CA

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si.,AK.,CA

ABSTRACT

ANALISYS OF THE APPLICATION OF FINANCIAL ACCOUNTING IN THE GOVERNMENT OF THE MORE STRAIGHT VILLAGE INUMAN DISTRICT, KUANTAN SINGINGI DISTRICT

BY:

SULISTIA NENGSIH

The purpose of this study is to find out how the application of accounting in the village of Lebuah Straight in Inuman District Kuantan Singingi Regency is based on General Accepted Accounting Principles.

The type of data used by researchers is Primary Data and Secondary Data. Primary Data is data in the form of oral statements obtained from the secretary and treasurer of the Village of Lebuah Straight in the District of Inuman, Kuantan Singingi Regency and the process of preparing the village financial statements. Secondary data is data obtained from Desa Lebuah perpendicular in the finished form, for example village organizational structure, village vision and mission, proof of village financial records and reports.

The results of this study are Lebuah Straight Village Inuman District Kuantan Singingi District does not make general journals, special journals both cash receipts and cash disbursements, does not process the posting to the ledger, does not make a trial balance and does not make adjustments to depreciation of fixed assets and inventories (consumables) and does not make a closing journal, so it can be said that the Application of Financial Accounting in the Government of Lebuah Straight Village Inuman District, Kuantan Singingi Regency is not yet fully in accordance with General Acceptable Accounting Principles.

Keywords: Financial Accounting and Village Governance

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DESA LEBUH LURUS KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

OLEH :

SULISTIA NENGSIH

Tujuan penelian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi di pemerintahan Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Jenis data yang digunakan peneliti adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang berupa keterangan-keterangan lisan yang diperoleh dari sekretaris dan bendahara Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dan proses penyusunan laporan keuangan desa. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Desa Lebu Lurus dalam bentuk jadi, misalnya struktur organisasi desa, visi dan misi desa, bukti pencatatan dan laporan keuangan desa.

Hasil penelitian ini adalah Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi tidak membuat jurnal umum, jurnal khusus baik jurnal penerimaan kas maupun pengeluaran kas, tidak melakukan proses pemostingan ke buku besar, tidak membuat neraca saldo dan tidak melakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap dan persediaan (bahan habis pakai) dan tidak membuat jurnal penutup, sehingga dapat dikatakan Penerapan Akuntansi Keuangan pada Pemerintahan Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Kata Kunci : Akuntansi Keuangan dan Pemerintahan Desa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN LEBUH LURUS KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”. Skripsi ini disusun untuk memengaruhi sebagai syarat Akademis dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran akan penulis terima untuk lebih menyempurnakan skripsi ini. Pada pelaksanaan penelitian ini penulis tidak mengalami kendala yang berarti, hal tersebut karena adanya pihak-pihak yang senantiasa memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan. Pada kesempatan dengan segala kerendahan hati ini penulis mengucapkan terimakasih sebanak-banyaknya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL**, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Drs. Abrar, SE., M.Si., Ak**, selaku Ketua Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu **Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Islam Riau.
4. Bapak **Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak., CA**, selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan

- pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.
5. Bapak dan ibu dosen Staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan pengetahuan ilmu pengetahuan kepada penulis.
 6. Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang selama ini memberikan kemudahan administrasi selama perkuliahan.
 7. Bapak **Rusdiman** selaku Kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dan seluruh staf yang telah memberikan izin dan telah banyak membantu penulis dalam pengambilan data yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 8. Orang tua tercinta, Ibu **Yensimar**, Nenek tercinta **Yulinar**, Abang tercinta, **Eka Apri S.E** ,Papi Tercinta, **IPDA Juliart Lumban Tobing**, yang selaku memberikan do'a, mendidik, membimbing, menasehati dan memberi kasih sayang yang besar serta dukungannya demi keberhasilan penulis. Dan juga untuk adik-adik tercinta **Lusi Rosita** dan **Triska Novia**, serta keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat, motivasi, do'a, nasehat dan dukungan kepada penulis atas penyelesaian skripsi ini.
 9. Terimakasih buat teman-teman **Mella Victoria**, **Nurfazilah**, **Nufus Wahyu Ningsih**, **Fitrah Devisa**, **Andela**, **Halimatun Sa'diyah**, **Lastri Mulyani**, **Hendri**, **Afrizal**, yang selalu mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Dan semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis mendoakan semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan Wabillahaufik walhidayah wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatu.

Pekanbaru, Desember 2019

Penulis

Sulistia Nengsih
15310901

DAFTAR ISI

	Halaman
ABTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	11
A. Telaah Pustaka.....	11
1. Definisi Desa.....	11
2. Otonomi Desa.....	12

3. Pengertian Pemerintah Desa.....	13
4. Pengelolaan Keuangan Desa.....	13
5. Aspek-Aspek dan Karakteristik Akuntansi Desa.....	16
6. Pihak-Pihak Pengguna Akuntansi Desa.....	17
7. Dasar Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Desa...18	
8. Pencatatan pada Pengelolaan Keuangan Desa.....	19
9. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Desa.....	20
10. Penyusunan Laporan Keuangan.....	21
11. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.....	22
12. Pengertian Akuntansi.....	24
13. Tahapan Siklus Akuntansi.....	26
B. HIPOTESIS.....	28
BAB III: METODE PENELITIAN	29
A. Lokasi Penelitian	29
B. Jenis dan Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisis Data	30

BAB IV:	GAMBARAN UMUM DESA LEBUH LURUS.....	31
	A. Sejarah Singkat Desa LebuLurus.....	31
	B. Struktur Organisasi.....	32
	C. Monografi Desa dan Kelurahan.....	34
	D. Kondisi Ekonomi.....	36
	E. Visi dan Misi Desa.....	37
BAB V:	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
	A. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi.....	39
	B. Proses Akuntansi.....	39
BAB VI:	PENUTUP.....	53
	A. Kesimpulan	53
	B. Saran.....	54
	DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1..... 33



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa

Lampiran 2 : Laporan Kekayaan Milik Desa

Lampiran 3 : Buku Kas Umum

Lampiran 4 : Buku Bank Desa

Lampiran 5 : Buku Pembantu Pajak

Lampiran 6 : Daftar aset / Inventaris

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel V.1.....	41
Tabel V.2.....	42
Tabel V.3.....	42
Tabel V.4.....	43
Tabel V.5.....	43
Tabel V.6.....	44
Tabel V.7.....	44
Tabel V.8.....	44
Tabel V.9.....	45
Tabel V.10.....	49
Tabel V.11.....	52

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dana Desa (DD) merupakan komitmen pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran konversi desa dalam APBN sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi terhadap keadaan desa, yang paling utama dalam penggunaan pengaturan dana desa dipimpin oleh peraturan menteri pembangunan daerah tertinggal dan migrasi Republik Indonesia No 22 Tahun 2016 tentang prioritas penggunaan dana Desa tahun 2017 dalam Undang-Undang yang menjelaskan dampak kepada pejabat desa untuk memberitahukan pendanaan desa yang transparan dan partisipatif. Manajemen keuangan desa, Karena pencatata laporan keuangan sangat penting dan harus transparan dan ditargetkan. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan menggunakan akuntansi desa supaya dapat mengelola dana ada agar berfungsi dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana unit yang terdapat di pemerintah berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar. Dengan semua latar belakang, minat dan kebutuhan mempunyai peran yang sangat strategis. Karena kemajuan negara sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara maju tanpa provinsi maju, dan bukan hanya provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, ini berarti bahwa dasar kemajuan negara ditentukan oleh kemajuan desa. desa memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik, dan desentralisasi otoritas utama dengan memperkuat fasilitas infrastruktur yang memenuhi persyaratan .

“Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mulai di sahkan pada tanggal 15 januari tahun 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif, kelahiran UU tentang desa menggantikan peraturan tentang desa yang terutang dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan PPNo.72 tahun 2005 tentang desa. Prioritas penggunaan dana desa diatur melalui peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia No.22 tahun2016 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 peraturan perundangan tersebut merupakan politicalwill dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditunjukkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat desa. Dengan diterbitkannya UU No.6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang-undang tentang desa tersebut disaming merupakan penguat status desa sebagai pemerintahan masyarakat desa. Kebijakan tata kelola desa yang dibuat dalam UU yang baru ini dianggap sebagai kibijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. beberapa kibijakan tersebut diantaranya adalah lokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan pelayanan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkat yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa”.

Laporan keuangan Desa menurut “Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa: (1) Anggaran (2) Buku Kas Umum (3) Buku Pajak (4) Buku Bank (5) Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Menurut IAI-KASP Tahun 2015, Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi. Tahap pencatatan merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai. Selain itu permendagri juga mengharuskan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan. Akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggapan pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan dan laporan keuangan Desa. Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

:Membuat perencanaan berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran, Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan, setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi, Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku investasi dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi, Untuk memperoleh informasi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca., neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan / posisi keuangan desa, Selain menghasilkan neraca untuk

pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa”.

Menurut IAI-KASP Tahun 2015, “siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi. 1) Tahap pencatatan merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai. 2) Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit. 3) Tahap pengikhsaran yaitu pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah di lakukan dengan benar. 4) Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini: (a) Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggran tertentu. (b) Laporan Kekayaan Milik Desa.

Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu”.

Akuntansi pemerintahan tidak berbeda dengan akuntansi umum, Akuntansi umum di jelaskan lebih terperinci terhadap siklus akuntansi yaitu analisis transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, dan laporan keuangan.

Jurnal merupakan suatu media atau metode yang di gunakan untuk mencatat transaksi keuangan. Jurnal di bedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang di gunakan untuk mencatat semua jenis transaksi. Sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang di gunakan untuk mencatat satu jenis transaksi saja. Contoh jurnal khusus adalah jurnal penerimaan kas.

Buku besar bisa diartikan buku berisi sekumpulan akun/akun/tafsiran (*account*). Akun yang di gunakan untuk mencatat pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, aset, utang dan dana ekuitas secara terpisah. Selanjutnya, memasukkan akun dari jurnal ke dalam buku besar inilah yang disebut **posting**. Posting ke buku besar pada saat yang sama adalah klasifikasi dan ringkasan transaksi dibawa ke masing-masing akun yang sesuai. Posting dapat dilakukan secara berkala (mingguan atau bulanan). Buku besar yaitu catatan akuntansi permanen yang terakhir, sehingga disebut *the books of final entry*.

Jurnal penyesuaian bisa diartikan sebagai jurnal yang pada akhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan akan disusun guna menghasilkan

pengaitan tepat antara pendapatan dengan belanja atau biaya. Penyesuaian dibutuhkan ketika terdapat transaksi yang mempengaruhi pendapatan dan belanja atau biaya dari satu periode anggaran.

Proses akuntansi selanjutnya yaitu membuat laporan /menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. sehingga, neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang di susun setelah pembuatan jurnal-jurnal penyesuaian. jika tahapan penyesuaian muncul rekening baru, maka rekening baru ini juga di masukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian.

Proses Akuntansi kantor Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan komputerisasi. Di mulai dari membuat rencana anggaran yang telah di susun dalam anggaran Pendapatan, belanja Desa, didalam pilaksanaan tersebut maka timbullah transaksi. Transaksi tersebut di masukan ke buku kas umum. Buku kas umum adalah bagian dari penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara Desa yang wajib mempertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawabannya.

Setelah mengumpulkan dan menginput semua jenis transaksi yang ada kedalam Kas Umum, seterusnya akan terprogram ke Buku Pajak, Buku Bank, seterusnya Kantor Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa persemesternya.

Laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa belum seimbang dengan adanya sumber

daya manusia yang memadai baik itu dilihat dari segi kualitas maupun di lihat dari segi kuantitas, akibatnya laporan yang dibuat dalam keuangan Pemerintah Desa masih banyak terdapat data-data yang disajikan belum sesuai dengan realisasi dan terdapat kekeliruan dalam pelaporannya.

Sistem pencatatan di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan 2 metode yaitu cash basis dan ada juga actual basis, dimana di laporan realisasi anggaran menggunakan cash basis, sedangkan di laporan kekayaan milik desa pada akun piutang desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan *accrual basis*.

Setelah diteliti data yang diperoleh dari Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yaitu tidak melakukan penyesuaian dan tidak menghitung nilai persediaan yang masih tersisa pada akhir periode. Oleh sebab itu, nilai persediaannya tidak diserahkan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa.

Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singigi juga tidak membuat penyusutan terhadap aset tetap seperti Peralatan dan Mesin senilai Rp. 15.650.000,00; Gedung dan Bangunan senilai Rp. 307.323.000,00; Jalan, Jaringan dan Instalasi senilai Rp. 318.596.200,00; Aset Tetap Lainnya senilai Rp. 44.000.000,00; di Laporan Kekayaan Milik Desa Lebu Lurus.

Berdasarkan uraian diatas melakukan penelitian dengan judul. **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DESA LEBUH LURUS KECAMATAN INUMAN KABUPATEN Kuantantan SINGINGI**

B. PERUMUSAN MASALAH

rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah Penerapan Akuntansi Keuangan pada Pemerintahan Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantantan Singingi Berdasarkan dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian akuntansi desa yang diterapkan pada desa lebu lurus, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pemerintahan Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantantan Singingi Berdasarkan dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

manfaat dalam penelitian adalah:

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dalam hal penerapan prinsip-prinsip akuntansi desa lebu lurus.

2. Bagi kantor desa lebu lurus

semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan pengembangan wawasan akuntansi keuangan di desa lebu lurus.

3. Bagi peneliti lanjutan

Semoga bisa jadi sebuah bahan pertimbangan dan masuka untuk penelitian yang sejenis, dan semoga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

sementara sistematika diterbitkan dalam penelitian ini dibagi menjadi enam bab yaitu:

BAB 1: Pendahuluan

Bab ini ia menjelaskan latar belakang masalah perumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, dan penulisan metodologis.

BAB II: Telaah Pustaka Dan Hipotesis

Bab ini mengeksplorasi tinjauan literatur hipotesis dan menyajikan konsep penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan lokasi operasional variabel pencarian, jumlah data, dan sumbernya, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV: Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisi tinjauan umum desa yang diteliti, struktur organisasi dan kegiatan desa.

BAB V: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bagian ini menjelaskan deskripsi umum obyek penelitian, hasil pencarian dan diskusi hasil pencarian.

BAB VI: Penutup

Bagian ini adalah bagian dari penelitian yang dilakukan, yang berisi kesimpulan dari diskusi di bab sebelumnya dan saran yang dapat dibuat dari penelitian saat ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. TELAAH PUSTAKA

1. Definisi Desa

Desa menurut definisi universal yaitu: suatu aglomerasi permukiman di area pedesaan (rural). dalam sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahan, Suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga saja.

Menurut Rosalinda Okta (2014) Desa sebagai:

Bagian dari sistem pemerintahan di republik indonesia yang disatukan yang di akui oleh republik otonomi dan kepala desa dengan otorisasi pemerintah atau pemerintah area untuk melakukan bebrapa urusan pemerintahan. Demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut kamus besar bahasa indonesia (2016) desa:

- a) Sebagian sekumpulan rumah yang terdapat diluar kota maupun yang terdapat didalam kota yaitu kampung / dusun yang ada di daerah tersebut.
- b) dusun atau udik (dalam pengertian) daerah yang disebut pedalaman tentunya sebagai kata lawan kota.
- c) Daerah, tanah, tempat yang terdapat di desa tersebut.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Desa yaitu:

“Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan / atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan menara kesatuan republik indonesia”.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:1) Desa adalah: Satuan pemerintahan yang diberi hak otonom adat sehingga merupakan badan hukum.

Jadi, kesimpulan yang kita ambil bahwa pengertian desa adalah sebuah sekumpulan rumah yang ada diluar kota baik yang terletak ditempat apapun didunia ini sebagaie kumpulan kecil juga membentuk kesatuan masyarakat hukum yang dasarnya mempunyai batasan wilayah guna mengatur keperluan pemerintahannya.

2. Otonomi Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011:19) Otonom Desa merupakan:

Kewenangan untuk mengatur semua keperluan dan mengurus urusan rumah tangga mereka sendiri, yang hanya boleh dilakukan masyarakat desa yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus urusannya. Orang-orang yang dari luar tidak berkepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.

3. Pengertian Pemerintahan Desa

Pengertian pemerintahan menurut Nurmayani (2009:2-3) yaitu:

Suatu Pemerintahan yang dapat diartikan sebagai seluruh lingkungan dalam pemerintahan, Negara tertentu, pemerintah sebagai lingkungan adalah alat-alat kelengkapan pemerintah. Pemerintah yang memiliki lingkungan permanen juga disebut pemerintah dalam arti statistik, dan dapat diartikan dalam pengertian dinamis, yang berisi gerakan atau kegiatan yang mengandung proses atau proses untuk operasi kekuasaan. Untuk menjalankan kekuasaan atau otoritas yang diwariskan dalam lingkungan kantor, harus ada pemegang kantor sebagai administrator (ambstrager). Pemikul jabatan yang menjalankan pemerintahan di suatu daerah tersebut, oleh sebab itu disebut pemerintah.

Menurut Eni Surasih (2016:23) Pemerintahan desa merupakan:

Pembagian yang ada di pemerintahan nasional yang dapat penyelenggaraannya ditujukan untuk suatu wilayah pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah bagian suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat yang ada di desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di suatu wilayah.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (IAI-KASP 2015: 2-5) Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengelolaan keuangan Desa meliputi: pencatatan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban:

- 1) perencanaan
 - a. “Wali/Walikota harus membuat penilaian selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak melakukan

evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.

- b. Jika ulasan diajukan atau disetujui dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- c. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Raperda tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Dengan dilakukannya pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa”.

2) Pelaksanaan

- a. “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti

- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam perkadestetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa”.

3) Penatausahaan

Bendahara harus :

- a. Catatan pelaksanaan setiap tanda terima dan publikasi serta penutupan buku setiap bulan terakhir secara tertib.
- b. Tanggung jawab

4) Pelaporan

persetujuannya atas implementasi bersangkutan :

- a. Bab 1 melaporkan, melaporkan implementasi APBDesa.
- b. Laporanbab terakhir diketahui dan terdiri dari laporan tentang pelaksanaan anggaran desa.

5) Pertanggungjawaban

- a. Laporan pertanggungjawaban implementasi APBDesa, diajukan untuk tahun fiskal yang relevan.
- b. Ini adalah bagian integral dari laporan tentang pengelolaan pemerintah desa.
- c. Diberitahu secara tertulis dan dapat diakses oleh publik .
- d. Itu dikirim ke wali/walikota melalui surat atau janji lainnya.

5. Aspek-aspek dan karakteristik Akuntansi Desa

- a. “Aspek fungsi: Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya pemerintahan desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (misalnya

kepala desa) yang dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

- b. Aspek aktifitas: Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang releva, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Sedangkan karakteristik penting akuntan desa, meliputi hal-hal sebagai berikut (IAI-KASP, 2015:6):

- 1) Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan desa.
- 2) Akuntansi desa sebagai suatu sistem dengan input data / informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.
- 3) Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintahan desa).
- 4) Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa dalam pengambilan keputusan”.

6. Pihak-pihak pengguna akuntansi desa

Menurut sujarweni (2015: 17) :

- 1) Pihak internal: pihak internal bisa diartikan sebagai pihak-pihak didalam struktur organisasi desa.
- 2) komisi penasehat desa (BPD). Badan penasehat desamembutuhkan informasi tentang desa untuk mengawasi pelaksanaan anggaran desa (APBDes).

- 3) Pemerintah di sini, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi /kota yang mengeluarkan anggaran belanja APBN dan APBD terhadap transfer, hasil dan bantuan keuangan.
- 4) Pihak selain pihak sebelumnya, masih ada lebih banyak pihak yang ingin berkonsultasi dengan laporan keuangan desa, misalnya LSM, RT/RW, dan masyarakat desa.

7. Dasar pencatatan dan dasar pengakuan akuntansi keuangan desa

a. Sistem pencatatan

Menurut Erlina (2015:4-5) :

terdapat berbagai sistem pencatatan yang di gunakan, sejumlah pencatatan yang diimplementasikan dengan *Singel Entry* pertama, *Double Entry* kedua, dan *Triple Entry* ketiga. Diantara ketiganya, satu-satunya perbedaan antara akuntansi yaitu penggunaan sistem pendaftaran. catatan pembukuan menggunakan sistem pencatatan *Singel Entry*, sedangkan catatan akuntansi menggunakan *Double Entry* dan *Triple Entry*.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012: 44-51) adalah sebagai berikut:

Akuntansi adalah proses untuk mengidentifikasi pengukuran yang dilakukan untuk mencatat dan melaporkan transaksi dari identifikasi, yaitu identifikasi transaksi yang ekonomi dan tidak pada ekonomi, dalam hal uang, proses selanjutnya adalah mengukur transaksi uang, seterusnya adalah pendaftaran ekonomi, yang terdiri dari data transaksi ekonomi yang menghubungkan dan mengurangi sumber daya saat ini dari pelaporan transaksi ekonomi yang akan menghasilkan data keuangan.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012: 45-51) :

System pencatatan didalam akuntansi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry* dan *triple entry*.

- a. *Single entry*: sistem login individu sering disebut sistem pembukuan tunggal. Dalam sistem ini, transaksi ekonomi dicatat dengan mencatat satu transaksi tunggal yang menghasilkan peningkatan kas yang dicatat di sisi pendapatan dan transaksi yang menghasilkan penurunan uang tunai akan dicatat di sisi pengeluaran.
- b. *Double entry*: Sistem entri ganda juga dikenal sebagai sistem pembukuan ganda adalah sistem pencatatan di mana transaksi ekonomi dicatat dua kali. Oleh sebab itu sistem masuk ganda dibagi menjadi 2.
- c. *Triple entry*: *triple entry* adalah pendaftaran masuk ganda, selain penganggaran. Oleh karena itu ketika *double entry* berjalan pada pemerintah, petugas manajemen keuangan (PKK) dari unit bisnis pemerintah (SKPD) serta manajemen keuangan atau unit bisnis manajemen.

8. Pencatatan pada Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, yaitu:

- a. "Pencatatan Transaksi Pendapatan: 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) : Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Hasil Usaha; Hasil Aset: Swadaya/Partisipasi/Gotong Royong ; Lain-lain pendapatan asli desa. 2) Transfer: Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Desa;

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa (ADD): Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. 3) Pendapatan Lain-lain: Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan Lain-lain pendapatan Desa yang Sah.

- b. Pencatatan Transaksi Belanja: Pada bagian ini dilakukan pencatatan atas belanja yang dilakukan berdasarkan pada kelompok, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja Tak Terduga. Masing-masing kelompok ini dalam pelaksanaannya dilakukan melalui Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, dan Belanja Modal”.
- c. Aset bersih, liabilitas dan Kekayaan Pemerintah Desa dicatat: dalam kelompok ini, catatan yang mempengaruhi status aset, liabilitas dan aset bersih pemerintah di desa dicatat pada akhir tahun fiskal yang relevan (per 31 Desember). Akhir tahun pencatatan dalam bentuk fiskal piutang atau utang..

9. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Desa

Menurut Rudianto (2012:20) :

Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat diandalkan mengenai tentang sumber daya ekonomi dan diperlukan dengan modal perusahaan, Untuk memberikan informasi yang dapat bertanggung jawab tentang sumber daya ekonomi perusahaan yang meningkatkan kegiatan bisnis

untuk menghasilkan laba, Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu melaporkan pengguna untuk memperkirakan potensi keuntungan yang membantu pengguna melaporkan untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan, memberikan informasi penting tentang sumber pendanaan dan sumber daya/laba, serta informasi yang terkait dengan pengeluaran dan investasi, Untuk memberi tahu kami informasi lebih lanjut terkait dengan laporan keuangan.

10. Penyusunan Laporan Keuangan Desa

Menurut IAI-KASP Tahun 2015, “Membuat laporan keuangan yang ada pada desa merupakan tahap terakhir dari siklus akuntansi. Data-data yang diperoleh dari laporan keuangan mulai diambil dari keseluruhan proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya laporan neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa: Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa atau APBDesa perubahan untuk satu tahun anggaran tertentu. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. 2) Laporan kekayaan milik desa: Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai tanggal 31Desember satu tahun. Laporan Kekayaan Milik Desa terdiri dari 3 akun pokok yaitu: aset desa, kewajiban, dan kekayaan bersih. Aset desa adalah

barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya yaitu berupa aset lancar dan aset tidak lancar. Contohnya aset lancar adalah kas, piutang desa, dan persediaan. Sedangkan aset tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa (tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan intalasi), dana cadangan dan aset non lancar pemerintah desa. Kekayaan bersih, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa”

11. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa

menurut IAI-KASP 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Buku besar : Setiap transaksi yang dilakukan terkait dengan penerimaan pengeluaran .
- b. *General cashbook* : *general cashbook* dimanfaatkan untuk mencatat berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran tunai, baik dilakukan secara tunai atau kredit, dandigunakan untuk mencatat mutasi booming bank/ kesalahan pembukuan. Ini dilakukan, pada awalnya perlu mendaftarkannya di buku kas umum, kemudian mencatat buku-buku masing-masing buku.
- c. Buku Kas Harian Pemabantu: Buku kas pembantu harian adalah buku yang digunakan untuk transaksi pembayaran dan penghasilan terkait uang tunai saja.
- d. Buku Kas Pembantu Kegiatan: Buku Kas Pembantu Kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari bendahara desa (panjar) atau dari

msyarakat (swadaya) yang telah dirupahkan. Pengeluaran dicatat oleh Pelaksana Kegiatan atas belanja-belanja yang telah dilaksanakan baik berupa belanja barang atau jasa maupun belanja modal. Atas saldo yang masih tersisa dan berada di pelaksana kegiatan, maka dilaksanakan penyetoran kepada bendahara desa. Hal yang perlu menjadi catatan adalah semua penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah dan lengkap, tidak hanya pengeluaran tetapi termasuk juga penerimaan. Bukti penerimaan yang perlu dibuat oleh pelaksana kegiatan berupa tanda terima swadaya berupa barang dan daftar hadir untuk tenaga atau gotong royong.

- e. Buku Pembantu Rincian Pendapatan: Buku rincian pendapatan adalah buku tambahan yang sebenarnya tidak ada dalam IAI-KASP Tahun 2015. Buku ini sebagai buku pembantu untuk mengcrosscheck dan mengelompokan rincian pendapatan yang diterima agar pada saat menyusun laporan realisasi APB Desa tidak mengalami kesulitan.
- f. Register Surat Permintaan Pembayaran: Register SPP merupakan dokumen tambahan yang tidak ada dalam IAI-KASP Tahun 2015. Register SPP berguna sebagai alat kontrol bagi sekretaris desa terhadap SPP yang diajukan dari pelaksana kegiatan, diperlukan dokumen berupa Register SPP yang dikelola oleh Sekretaris Desa Dengan Register SPP ini, Sekretaris Desa dapat mengetahui jumlah SPP yang sedang diproses serta tingkat kemajuannya apakah sudah diverifikasi sekdes, disetujui Kades atau sudah dibayarkan oleh Bendahara Desa”.

- g. Lembar kerja: Kertas kerja atau neraca lajur telah disahkan untuk memfasilitasi pelaporan, Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi anggaran desa dan laporan aset desa. Angka-angka yang disajikan dalam lembar kerja diperoleh dari neraca semua buku catatan dengan memperhitungkan kemungkinan koreksi terhadap penyajian angka-angka ini.
- h. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa: Laporan ini menyajikan paling tidak unsur-unsur LRA dari pendapatan, pengeluaran, transfer dan pembiayaan. Laporan pencapaian anggaran memberikan informasi tentang pembuatan anggaran dan pendapatan LRA, pengeluaran, transfer surplus/defisit LRA, entitas pelaporan pendanaan. Informasi ini berguna untuk melaporan pengguna dalam menilai keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, dan komitmen akuntabilitas dan pelaporan anggaran karena memberikan informasi berikut:
- a. Pertama, Informasi tentang sumber, alokasi, dan sumber daya ekonomi.
 - b. Kedua, Informasi tentang realisasi anggaran berguna dalam hal efisiensi dan efektifitas pengguna anggaran.
- i. Laporan KepimilikanDesa: Laporan ini adalah milik desa dan dikaitkan dengan perbedaan antara aset milik desa dan jumlah total kewajiban desa pada tanggal 31 desember setiap tahun.

12. Pengertian Akuntansi

Definisi akuntansi menurut *american institute cercitified publik accounting* (AICPA) dalam buku Rizal effendi (2015) :

Di sini, akuntansi yaitu pencatatan, klasifikasi dan pengiktisaran senior dengan cara tertentu dan dalam istilah moneter, transaksi saat ini dan peristiwa dalam keuangan umum di alam dan termasuk mendukung hasil yang sudah.

Menurut sofyan syarif harahap (2011:3) :

Di sini Akuntansi adalah alat komunikasi bisnis atau linguistik pada umumnya yang memberikan informasi tentang keuangan (ekonomi) pada saat itu dan terdiri dari pembiayaan jumlah kekayaan, pengeluaran dan modal.

Menurut Hery (2016:2) pengertian akuntansi yaitu:

Di sini menggunakan sistem informasi yang dapat melaporakan kepada pengguna informasi akuntansi atau pihak yang berpentingan dengan hasil keuangan perusahaan dan persyaratan perusahaan pada waktu itu. Akuntansi adalah seperangkat konsep dan keadaan keuangan suatu perusahaan.

Menurut Rudianto (2012:09) akuntansi dapat dibagi menjadi beberapa jenis spesifikasi dalam praktiknya:

1. Akuntansi Manajemen :ini adalah bidang akuntansiyang menyediakan data dan informasi manajemen untuk membuat keputusan setiap hari dan merencanakan perubahan di masa depan. Misalnya, berikan data biaya untuk menentukan harga jual beberapa dan pertimbangan terkait.
2. Akuntansi Biaya :biaya Akuntansi adalah bidang akuntansi dengan fungsi utama sebagai biaya pengendalian dalam proses produksi yang

dilakukan perusahaan. Kegiatan utama dari bidang ini menyediakan data.

3. Akuntansi Keuangan: Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang bertugas untuk melaksanakan seluruh proses akuntansi dapat menghasilkan informasi keuangan untuk pihak eksternal perusahaan, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, neraca dan laporan arus kas. Secara umum bidang akuntansi keuangan mencatat dan melaporkan seluruh transaksi dan status keuangan suatu badan usaha untuk kepentingan pihak di luar perusahaan.
4. Akuntansi Pajak: Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang fungsi mengumpulkan data tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban dan hak perpajakan dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, sampai dengan penghitungan pembayaran pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.

13. Tahapan Siklus Akuntansi

Menggunakan sebuah siklus akuntansi, artinya terdiri dari berbagai tahapan tertentu. Menurut IAI-KASP Tahun 2015 :

- a. “Tahap Pencatatan: Tahap ini merupakan Langkah awal dari siklus akuntansi berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.
- b. Tahap Penggolongan: Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap pengelompokan catatan

bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit.

- c. Tahap Pengikhtisaran: Tahap pengikhtisaran adalah tahap yang dilakukan untuk pembuatan neraca saldo serta kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa bisa berfungsi untuk memeriksa keakuratan dalam memposting akun kedalam debit dan kredit. Didalam laporan Kekayaan Milik Desa, jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang sehingga perlu pemeriksaan saldo debit dan kredit dalam laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Jadi, pembuktian bukan merupakan indikasi bahwa pencatatan dilakukan yang benar.
- d. Tahap Pelaporan: Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini: pertama Membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yang memuat jumlah anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan dari pemerintah desa bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu dan selanjutnya Membuat laporan kekayaan milik desa, membuat posisi dari aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu”.

B. HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang dikemukakan diatas, maka berikut ini penulis kemukakan hipotesis penelitian yaitu:

“ Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Lebuh lurus kecamatan inuman kabupaten kuantan singingi belum sesuai dengan PrinsipAkuntansi Berterima Umum”



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Jenis data dan sumber data

Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis berdasarkan dari pengamatan dan dokumen yang diberikan oleh Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman adalah Data primer dan data Sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pengelolaan Desa Lebu Lurus, pada tanggal berdirinya Desa Lebu Lurus, dan sistem pencatatan yang dilakukan di Desa Lebu Lurus. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang dikumpulkan, Desa Lebu Lurus .

C. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara langsung dan pertanyaan tentang hal-hal yang periksa meliputi kegiatan Desa Lebu Lurus. Sejarah perkembangan Lebu lurus dan kebijakan operasional langsung dalam akuntansi.
- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data seperti laporan keungan dan sejarah desa.

D. Teknik analisis data

Selanjutnya didalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu analisis melalui analisis dan perbandingan dengan berbagai jenis teori yang berkaitan dengan pembahasan perhitungan topik. Tujuannya yaitu memberikan deskripsi-deskripsi atau gambaran fakta yang sistematis, realistis, dan akurat.



BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA LEBUH LURUS

A. Sejarah Singkat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Desa lebu lurus yaitu: yang terdapat pada lingkungan sekitar Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Riau, dimana sebelumnya pada desa Lebu Lurus Desa Devinitif terbentuk mulanya dulu merupakan transmigrasi Banjar Nan Tigo Taluk Kuantan yang di awal di bukanya pada tahun 1970. Setelah dibebaskan dari pembinaan Transmigrasi kemudian membentuk Desa Lebu Lurus secara *administrative* dibawah pembinaan Pemerintah Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Dan tahun 2014 dilakukan pemekaran/pemisahan Kecamatan, maka Desa Lebu Lurus pada saat ini berada dalam wilayah *administrative* Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, yang pada saat ini, itu adalah bagian dari 14 Desa yang terdiri dari 8 Desa eks Transmigrasi dan 4 Desa setempat.

Selanjutnya yang terdapat pada Desa Lebu Lurus di lihat dari geografis desa ini adalah: dataran tinggi, seperti sama-sama bisa terlihat dari daerah desa Lebu Lurus memiliki Luas 1.100 Ha, terdapat di Daratan seluas ± 1.106 Ha dan wilayah perairannya seluas ± 4 Ha, dengan luas permukimannya ± 130 Ha. Jumlah penduduk Desa Lebu Lurus pada tahun 2018 berjumlah 2.368 jiwa yang terdiri dari 1080wanita yang terdapat di Desa Lebu Lurus dan 1.288 penduduk laki-laki yang jumlahnya terdiri atas 612 Kepala Keluarga pada Desa Lebu Lurus.

Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yaitu desa yang miskin dengan kondisi geografis mayoritas dataran tinggi. Setiap orang

mendengar Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman adalah yang sudah ramai penduduk karna terletak pada tepi jalan lintas yang mudah dilalui karena kondisi jalan cukup bagus.

B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Government village adalah lembaga yang memasok pemerintahan pusat yang memiliki peran penting bagi masyarakat yang makmur di desa untuk pembangunan pemerintahan yang damai. Struktur organisasi Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi ditunjukkan pada Gambar IV.1

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan kepala pemerintah desa tertinggi yang dibantu perangkat desa untuk menyelenggarakan pemerintahan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa (UU RI No 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1).

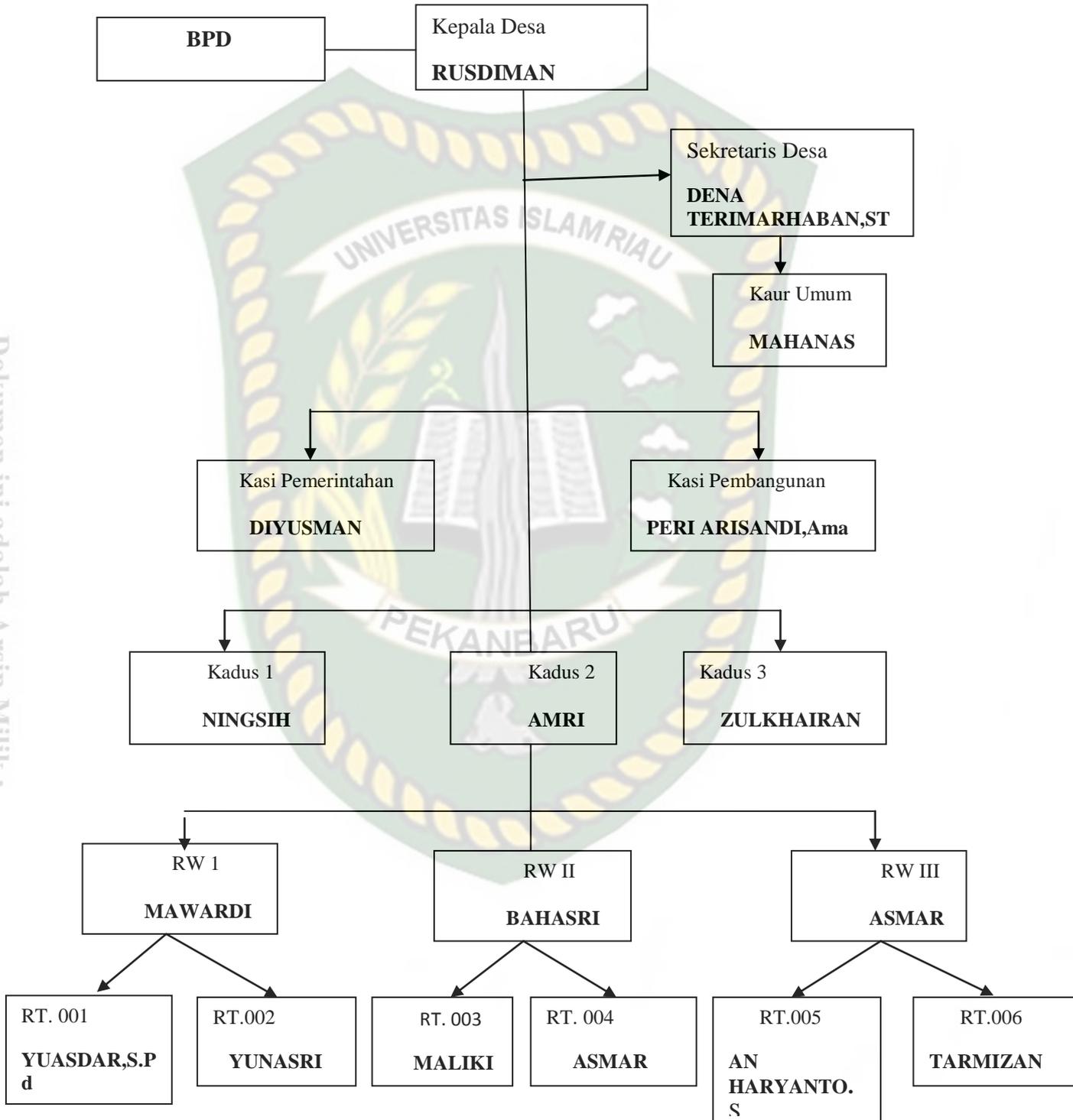
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk melaksanakan fungsi pemerintahan (UU RI No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 4 tentang UU Desa).

3. Sekretaris

Sekretaris adalah bagian dari perangkat desa yang membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

STRUKTUR ORGANISASI



4. Pelaksanaan

- a) unit pemerintahan adalah bagian dari perangkat desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan mengelola departemen pertahanan, mengelola populasi, mempromosikan perdamaian dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan untuk manajemen yang tepat.
- b) Kelompok pengembangan adalah bagian dari otoritas desa, yang membantu kepala desa dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan departemen manajemen pembangunan, menyiapkan bahan untuk mengusulkan kegiatan dan menjalankan fungsi manajemen bersama.

5. Pelaksanaan kewilayahan

Kepala Dusun (KADUS) yaitu yang membantu kepala desa dalam urusan desa.

C. Monografi Desa dan Kelurahan

1. Luas Desa/kelurahan : 75 km
 - a. Batas wilayah
 - b. Sebelah Utara : Lubuk Kombang Bungo Kecamatan Ukui
 - c. Sebelah Selatan : Desa Banjar Nan Tigo
 - d. Sebelah Barat : Desa Pasar Inuman
 - e. Sebelah Timur : Desa Bedeng Sikuran

b. Kondisi Geografi

- Ketinggian dari permukaan laut : 1.200
- Suhu Udara rata-rata : 35 derajat celcius

c. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan ke Desa/kelurahan)

- Ibu Kota Kecamatan : 3 km
- Ibu Kota Kabupaten : 58 km
- Ibu Kota Provinsi : 225 km

d. Jumlah penduduk menurut mata pencarian

- PNS :40
- TNI/Polri : 5
- Karyawan swasta : 30
- Petani : 600
- Pedagang :200 orang
- Buruh Tani : 10 orang
- Pertukangan : 8 orang
- Buruh tani : 11 orang
- Pensiunan : 6 orang
- Wirausaha lainnya : 1.468 orang

e. Sarana perhubungan

- Jembatan kayu : 2 buah (8 meter)
- Jembatan darurat : 2 buah (6 meter)
- Box couvert : 4 buah (68 meter)

f. kesehatan

- Puskesmas pembantu : 1 unit
- Posyandu 3 unit
- Bidan : 5 orang
- Dukun bayi terlatih : 4 orang

g. Infrastruktur ekonomi

- Koperasi Unit Desa : 2 unit
- Industri dalam negeri : 6 unit

D. Kondisi Ekonomi

1. keunggulan Desa

Pengembangan potensi keunggulan Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang perlu pengembangan :

- Pengembangan tanaman karet
- perluasan peternak sapi
- Pengembangan peternak kerbau
- Pengembangan peternak perikanan

2. Pertumbuhan ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi penduduk Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu, dan bisa dilihat melalui daya beli masyarakat dan kurangnya kemiskinan.

E. Visi dan misi Desa

1. Visi Lebu Lurus

Mewujudnya masyarakat Desa Lebu Lurus yang tentram, maju, makmur, dan berkeadilan, menjadikan Desa Lebu Lurus menjadi Desa cemerlang, gemilang, dan terbilang. Serta menjadikan Desa Lebu Lurus menjadi Desa percontohan di Kabupaten Kuantan Singingi umumnya pada Kecamatan Inuman.

2. Misi Desa Lebu Lurus

Dalam rangka pencapaian Visi Desa Lebu Lurus maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

- a. Melakukan program-program Pemerintah Desa Lebu Lurus .
- b. Pemberdayaan atas semua potensi yang ada di masyarakat, yaitu:
 - Membudidayakan Sdm
 - Membudidayakan ekonomi kerakyatan
- c. Akan Menciptakan masa depan komunitas Desa Lebu Lurus yang aman, tertib, dan harmonis melalui komitmen terhadap prinsip-prinsip :
 - Duduk sama rendah berdiri sama tinggi.
 - Cahaya dan berat yang sama memiliki bobot yang sama.
- d. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Desa Lebu Lurus yang meliputi:
 - Meningkatkan profesional dan mengaktifkan seluruh perangkat Desa.

- Meningkatkan manajemen yang transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan layanan ke komonitas utama dengan cepat, akurat, dan benar.
- Meningkatkan implementasi pembangunan berkelanjutan dan memprioritaskan partisipasi dan kerja sama masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disini kami akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan tentang pengelolaan Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan landasan teori yang diperoleh, penulis akan berusaha menganalisis tentang akuntansi keuangan yang diterapkan di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi

Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi memakai sistem pencatatan tata buku tunggal (*singel entry*), karena Desa Lebu Lurus hanya mencatat transaksi satu kali yaitu pada saat terjadinya penerimaan kas atau pengeluaran kas.

Dasar pengakuan Desa lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan *Cash Basis*, karena Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi mengakuinya telah terjadi transaksi saat uang sudah diterima dan dikeluarkan.

B. Proses Akuntansi

Proses pengelolaan keuangan yang dilakukan Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sudah menggunakan aplikasi SISKUEDES (Sistem Keuangan Desa). Proses penyusunannya dimulai dengan mencatat bukti-bukti transaksi baik yang berkaitan dengan penerimaan pengeluaran untuk pengeluaran, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan kedalam Buku Kas Umum.

Berdasarkan siklus Akuntansi yang selama ini dilakukan Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi terdapat permasalahan yaitu tidak melakukan penyesuaian dan tidak menghitung nilai persediaan yang masih tersisa pada akhir periode. Masalah lainnya yaitu tidak dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap seperti peralatan dan mesin Rp. 15.650.000,00; Gedung dan Bangunan Rp. 307.323.000,00; Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp. 318.596.200,00; dalam laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 6).

1. Buku kas umum

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, “Buku kas umum di gunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas yang bersifat tunai. Buku kas umum yang terjadi pada Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan format dan unsur-unsur yang disebutkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tetapi tidak sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum seperti pencatatan transaksi penerimaan kas nya tidak langsung di jurnal, melainkan dicatat kedalam Buku Kas Umum (BKU)”. Berikut ini .

TABEL V.1
Buku Kas Umum-Tunai
Tahun Anggaran 2018

N o	Tgl	Re ke- nin g	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No Bu kti	Peng. Komul atif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03/04 /2018		penarik tunai ADD kas di bendahara	161.587.200				161.587.200
2	03/04 /2018		Tarik tunai DD kas di bendahara	136.058.400				297.645.600
3	03/04 /2018		Operasional/I nsentif RT/RW kas di bendahara		1.800.000			295.845.600
4	03/04 /2018		Operasional perkantoran kas di bendahara		5.525.000			290.320.600
5	03/04 /2018		Operasional perkantoran kas di bendahara		11.387.400			278.933.200

Sumber : Data olahan penulis Tahun 2019

a. Jurnal Penerimaan Kas

Berdasarkan tabel v.1, pencatatan transaksi yang dilakukan oleh Desa Lebu
Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi diatas belum sesuai
dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum, karena semua transaksi dicatat
pada Buku Kas Umum. Seharusnya, setiap transaksi harus langsung dijurnal
agar informasinya akurat. Pada Tabel V.2 merupakan contoh jurnal umum
penerimaan kas yang seharusnya ditetapkan oleh Desa Lebu Lurus.

Tabel V.2
Jurnal Penerimaan Kas
Tahun Anggaran 2018

Tanggal	No Bukti	Uraian	Debit	Kredit
03/04/2018		Kas di Bendahara Pengeluaran Desa Kasda	161.587.200	161.587.200
03/04/2018		Kas di Bendahara Pengeluaran Desa Kasda	136.058.400	136.058.400

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

b. Jurnal Pengeluaran Kas

Berdasarkan tabel V.1, pencatatan transaksi yang dilakukan oleh Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi diatas belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum, karena semua transaksi dicatata pada Buku Kas Umum. Seharusnya, setiap transaksi harus langsung dijurnal agar informasi akurat. Pada Tabel V.2 merupakan contoh jurnal umum pengeluaran kas yang seharusnya diterapkan oleh Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel V.3
Jurnal Pengeluaran Kas
Tahun Anggaran 2018

Tanggal	No Bukti	Uraian	Debit	Kredit
03/04/2018		Belanja Penghasilan Tetap Kas di Bendahara Pengeluaran Desa	1.800.000	1.800.0000
03/04/2018		Belanja Operasional BPD Kas di Bendahara Pengeluaran Desa	5.525.000	5.525.000
03/04/2018		Belanja Pengeluaran Desa	11.387.400	11.387.400

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

c. Buku Besar

Setelah semua transaksi di jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya memposting ke Buku Besar seperti Tabel V.4 sampai dengan Tabel V.9

Tabel V.4
Buku Besar
Tahun Anggaran 2018

Kas

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01/12/2018	Saldo awal				
03/04/2018	Penerimaan kas		161.587.200		161.587.200
03/04/2018	Penerimaan kas		136.058.400		297.645.600
03/04/2018	Pengeluaran kas			1.800.000	295.845.600
03/04/2018	Pengeluaran kas			5.525.000	290.320.600
03/04/2018	Pengeluaran kas			11.387.400	278.933.200

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Tabel V.5
Buku Besar
Tahun Anggaran 2018

Alokasi Dana Desa

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
03/04/2018	Saldo awal				
03/04/2018	Penerimaan kas			161.587.200	161.587.200
03/04/2018	Penerimaan kas			136.058.400	297.645.600

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Tabel V.6
Buku Besar
Tahun Anggaran 2018

Belanja Pegawai

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
03/04/2018	Saldo awal				0
03/04/2018	Pengeluaran kas		1.800.000		1.800.000
Saldo Akhir					1.800.000

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Tabel V.7
Buku Besar
Tahun Anggaran 2018

Belanja Barang dan Jasa

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
03/04/2018	Saldo awal				0
03/04/2018	Pengeluaran kas		5.525.000		5.525.000
					5.525.000

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Tabel V.8
Buku Besar
Tahun Anggaran 2018

Belanja Modal

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
03/04/2018	Saldo awal				0
03/04/2018	Pengeluaran kas		11.387.400		11.387.400
Saldo Akhir					11.387.400

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

d. Neraca Saldo

Setelah semua transaksi di posting ke buku besar, langkah selanjutnya adalah Neraca Saldo. Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya membuat neraca saldo seperti Tabel V.9

Tabel V.9
Neraca Saldo (Sebagian)
Tahun Anggaran 2018

Tanggal	Uraian	Jumlah	
		Debit	Kredit
31/04/2018	Kas	278.933.200	
	Peralatan dan mesin	15.650.000	
	Gedung dan bangunan	307.323.000	
	Jalan, jaringan dan instalasi	318.595.200	
	Pendapatan transfer		1.184.260.000
	Belanja pegawai	1.800.000	
	Belanja barang dan jasa	5.525.000	
	Belanja modal	11.387.400	

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

e. Jurnal penyesuaian

Tahap selanjutnya penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurna yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan (akun) agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Pemerintah Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten

Kuantan Singingi tidak membuat jurnal penyesuaian dikarenakan Pemerintah Desa tidak berpedoman dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1. Bahan Habis pakai (persediaan)

Bahan habis pakai digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari dan dapat digunakan hanya sekali atau untuk waktu singkat. Apa Yang terjadi pada Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi adalah: disini tidak membuat penyesuaian dan tidak menghitung nilai persediaan yang masih tersisa pada akhir periode. Oleh karena itu, nilai persediaan tersebut tidak disajikan dalam laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 6). Seharusnya Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi menghitung sisa bahan habis pakai agar informasi pada akun bahan habis pakai menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian untuk bahan habis pakai yaitu:

Beban Bahan Habis Pakai (Debit)

Persediaan Bahan Habis Pakai (Kredit)

2. Penyusutan Aset Tetap

Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi di sini tidak dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap seperti peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, jalan, jaringan dan instalasi disajikan terlalu tinggi dalam laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 2). Dampaknya adalah akun-akun tersebut tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya sehingga laporan keuangan yang dibuat adalah kesalahan dan menyebabkan kesalahan keputusan.

Sebaiknya di sini, Pemerintahan Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi menghitung penyusutan aset tetap setiap tahun, karena penyusutan merupakan pengurang dari aset tetap yang mengurangi aset bersih.

a. Peralatan dan mesin

Nilai perolehan : Rp.15.650.000

Metode Garis Lurus

Penyusutan per tahun = $\frac{\text{Rp.15.650.000}}{5 \text{ tahun}}$

5 tahun

=Rp.3.130.000

Jurnal yang dibuat :

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 3.130.000
--------------------------------------	---------------

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 3.130.000
--	---------------

b. Gedung dan Bangunan

Nilai Perolehan : Rp. 307.323.000

Metode Garis Lurus

Penyusutan per tahun = $\frac{\text{Rp. 307.323.000}}{10 \text{ tahun}}$

10 tahun

=Rp. 30.732.300

Jurnal :

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. 30.732.300
--------------------------------------	----------------

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. 30.732.300
--	----------------

Tabel V.10
Neraca Saldo Setelah Disesuaikan
Desa Lebu Lurus
Tahun Anggaran 2018

Tanggal	Uraian	Jumlah	
		Debit	Kredit
31/04/2018	Kas	Rp. 278.933.200	
	Peralatan dan mesin	15.650.000	
	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin		3.130.000
	Gedung dan bangunan	307.323.000	
	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan		30.732.300
	Jalan, jaringan dan instalasi	318.596.200	
	Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan instalasi		15.925.810
	Pendapatan transfer		1.184.260.000
	Belanja pegawai	1.800.000	
	Belanja barang dan jasa	5.525.000	
	Belanja modal	11.387.400	

Sumber : Data Olahan Penulisan Tahun 2019

g. Jurnal Penutup

Di sini Langkah berikutnya adalah: membuat jurnal penutup. Akun yang ditutup adalah akun nominal, sehingga saldonya menjadi nol. Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi tidak membuat jurnal penutup. Seharusnya Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi membuat jurnal penutup seperti berikut.

1) Pendapatan Rp. 329.927

Ikhtisar Surplus/Defisit Rp. 329.927

2) Ikhtisar Surplus/Defisit Rp. 65.612.928

Ekuitas Dana Rp. 65.612.928

3) Ikhtisar Surplus/Defisit Rp. 65.942.855

Ekuitas Dana Rp. 65.942.855

2. Buku Pajak

Buku pajak digunakan untuk: membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sudah membuat Buku Pajak (lampiran 2) sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan prinsip Akuntansi Berterima Umum.

3. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk: membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sudah membuat Buku Bank (lampiran 3).

4. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Buku kas pembantu kegiatan adalah: buku yang mencatat semua jenis kegiatan yang diselenggarakan desa yang memakai Dana Desa, yang dicatat sesuai dengan bidang dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam buku kas pembantu kegiatan mencatat belanja desa masing-masing yaitu, penyelenggaraan tetap dan tunjangan, pelaksana pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Masing-masing mencatat biaya untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja jasa, dan belanja modal. Penyajian Buku Kas Pembantu Kegiatan (lampiran 4)

Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

C. Penyajian Laporan Keuangan

Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi telah membuat laporan keuangan diantaranya:

1. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksana APBDesa: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksana APBDesa (lampiran 5) termasuk jumlah anggaran, pendapatan, pengeluaran dan pendanaan dari pemerintah desa terkait untuk tahun anggaran tertentu. lihat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksana APBDesa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.
2. Laporan Kekayaan Milik Desa: Lampiran Kekayaan Milik Desa (lampiran 6) berisi aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki desa. Tujuannya dari laporan ini yaitu untuk mengetahui jumlah kekayaan milik bersih desa. Penyajian Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 6) Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan Permendagri. Laporan Kekayaan Milik Desa, Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya di buat seperti Tabel V.II.

Tabel V.11
Laporan Kekayaan Milik Desa
Desa Lebu Lurus
Sampai dengan 31 Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
I. ASET		
A. ASET LANCAR		
i. kas dan bank		
a. Kas di bendahara desa	Rp.112.863.272	
b. Rekening kas desa	Rp. 995.429	
ii. Piutang		
a. Piutang sewa tanah		
b. Piutang sewa gedung		
c. Piutang sewa peralatan		
d. Dst.....		
iii. Persediaan		
a. Persediaanbenda posdan materai		
b. Persediaan ATK		
c. Dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR	Rp. 113.858.701	
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Aset Tetap		
a. Tanah		
b. Peralatan dan Mesin	15.650.000	
c. Akum.Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.130.000)	12.520.000
d. Gedung dan Bangunan	307.323.000	
e. Akum.Penyusutan Gedung dan Bangunan	(30.732.300)	304.193.000
f. Jalan, Jaringan dan Instalasi	318.596.200	
g. Akum.Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi	(15.925.810)	302.670.390
h. Aset Tetap Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		619.383.390
JUMLAH ASET (A+B)		732.242.091
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)		732.242.091

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang bermanfaat sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Kesimpulan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, menggunakan Cash Basis, dimana catatan dibuat setelah menerima dana dan ketika dana dikeluarkan.
2. Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, tidak bertindak sebagai buku besar pada saat klasifikasi. Sejak sistem pencatatan Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi mulai secara langsung memasukkan data desa umum dan data pendapatan dan pengeluaran atau data pembangunan dalam aplikasi aplikasi SISKUEDES.
3. Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi tidak membuat neraca saldo, tidak membuat penyesuaian terhadap persediaan (bahan habis pakai) dan penyusutan aset tetap, dan tidak membuat kertas kerja pada tahap pengiktisaran.
4. Proses akuntansi pada penerimaan Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten kuantan Singingi belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

B. Saran

Saran dapat dibuat sebagai berikut:

1. Lebuh Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dapat menggunakan siklus akuntansi yang dimulai dengan membuat catatan, tahap penggolongan, tahap pengiktisaran dan tahap pelaporan.
2. Lebuh Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sebaiknya membuat buku besar pada tahap penggolongan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi yang akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan.
3. Lebuh Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sebaiknya membuat neraca saldo, melakukan penyesuaian terhadap Persediaan (bahan habis pakai) dan melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap agar informasi saldo akun aset tetap menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
4. Lebuh Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sebaiknya berpedoman pada Akuntansi Berterima Umum tentang Siklus Akuntansi dalam mengelola keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Rizal. 2015. Prinsip-prinsip Akuntansi Berbasis SAK-ETAP. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Erlina, dkk. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad SyamKusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Harahap, SofyanSyafri. 2011. Teori Akuntansi. Jakarta: PenerbitRajawali Pers.
- Hery. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widasarana Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan PemerintahanDesa. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nurmayani. 2009. Hukum Administrasi Negara. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Okta Rosalinda, 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorojo dan Ploso Korop, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Universitas Brawijaya, Malang.
- Rudianto. 2012. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. AkuntansiDesa. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Surasih Eni. 2016. Pemerintahan Desa dan Implementasinya. Jakarta: Erlangga.
- Warren, Carl S, James M. Reeve, Jonathan E Duchacdkk. 2014. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- IkatanAkuntan Indonesia (IAI). 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. Pedoman Asisten Akuntansi Keuangan Desa. Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau